

# KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Galih Ramadhan Gunawan

NPP. 32.0372

*Asdaf Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [ramadhangalih124@gmail.com](mailto:ramadhangalih124@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Food Security is a condition of fulfilling food needs for all people, both individually and nationally. Therefore, the availability of rice is very important because rice is the basic need of most Indonesian people, especially in Tasikmalaya Regency. Population growth is increasing, so the demand for rice is increasing, but the availability of agricultural land is decreasing due to land conversion into settlements and public facilities. **Purpose:** This study aims to determine and analyze how cross-sector coordination in maintaining food security, in this case the availability of rice in Tasikmalaya Regency. **Method:** This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique used data triangulation techniques, namely interviews, observation, documentation with 19 informants with data analysis techniques according to Miles and Huberman. **Result:** The results of this study reveal that cross-sector coordination in maintaining food security, especially rice availability in Tasikmalaya Regency, has been running in accordance with existing mechanisms. These results were obtained through a qualitative descriptive approach that refers to Hasibuan's coordination theory, which includes vertical and horizontal dimensions. However, the main problems in vertical coordination are the different interpretations of targets between the central and local governments and the absence of key officials in the meeting forum, which causes delays in strategic decision-making. Meanwhile, the horizontal coordination dimension found obstacles in data synchronization and rice distribution between institutions. In addition, each sector has not fully aligned its vision and mission in a collaborative manner, which has an impact on not maximizing the achievement of food security goals. **Conclusion:** The results of this study reveal that cross-sectoral coordination in maintaining food security, especially rice availability in Tasikmalaya Regency, has been running in accordance with existing mechanisms. However, there are still problems in both the vertical and horizontal coordination dimensions.

**Keywords:** Cross Sector Coordination, Food Security, Rice Availability.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi semua orang, baik secara individu maupun nasional. Maka dari itu ketersediaan beras sangatlah penting karena beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat

Indonesia khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka permintaan akan beras semakin meningkat, tetapi ketersediaan lahan pertanian semakin menurun karena alihfungsi lahan menjadi pemukiman dan fasilitas umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan, dalam hal ini ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dengan 19 informan dengan teknik analisis data menurut Miles and Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hasil ini diperoleh melalui pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada teori koordinasi Hasibuan, yang mencakup dimensi vertikal dan horizontal. Akan tetapi terdapat permasalahan utama pada koordinasi vertikal adalah adanya perbedaan interpretasi target antara pemerintah pusat dan daerah serta ketidakhadiran pejabat kunci dalam forum rapat yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, dalam dimensi koordinasi horizontal ditemukan kendala dalam sinkronisasi data dan distribusi beras antarlembaga. Selain itu, masing-masing sektor belum sepenuhnya menyelaraskan visi dan misinya secara kolaboratif, yang berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian tujuan ketahanan pangan. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Akan tetapi masih terdapat permasalahan baik dari dimensi koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

**Kata kunci: Koordinasi Lintas Sektor, Ketahanan Pangan, Ketersediaan Beras.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat lokal, tetapi juga telah menjadi topik diskusi internasional. Indonesia masih terus menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan, akses pangan, keamanan pangan dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat. Menurut (Sulaiman, 2017) ketahanan pangan memiliki cakupan luas, dimulai dari tingkat pemerintah pusat dengan dukungan kebijakan dan anggaran, hingga ke tingkat daerah. Semakin kompleks permasalahan ketahanan pangan menjadi pekerjaan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, secara tidak langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa pangan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pada pemerintah daerah. Urusan konkuren yang dibagi dalam 2 urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Sementara, urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar menjadi urusan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia (Agustian, 2021). Di Kabupaten Tasikmalaya, ketahanan Pangan menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian khusus karena berbagai permasalahan yang kompleks. Menurut *Food and agriculture Organization* (FAO) menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 (empat) komponen, yaitu: kecukupan ketersediaan bahan pangan, stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan, dan Kualitas/keamanan bahan pangan yang digunakan. Seperti halnya di Provinsi Jawa Barat, daerah agraris yang memiliki potensi terhadap sektor pertanian. Pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang optimal. Sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Jawa Barat, harus menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan pangan masyarakat serta untuk menunjang pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah justru memunculkan masalah yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. Ini dapat terlihat pada masalah pedesaan dan pada sektor pertanian. Hal ini dapat menggambarkan bahwa saat ini, Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses transisi pembangunan infrastruktur seperti jalan, pabrik, perkantoran, pemukiman, dan sebagainya (Abdullah et al., 2022). Secara sadar pemerintah melakukan defisit lahan garapan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan lokal. Luas panen padi di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah sebanyak 1.586.888,63 hektar. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.604.109,31 hektar. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 1.662.404,00 hektar. Kemudian di tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 1.583.656 hektar. Secara keseluruhan luas panen padi di Provinsi Jawa barat mengalami fluktuasi. Dari tahun 2020-2023 lahan pertanian padi menyusut dari 1.586.888,63 ha menjadi 1.583.656 ha. Alihfungsi lahan terus terjadi di Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat berjalan dengan sangat pesat. Tentu hal ini merupakan sebuah tren positif terhadap pembangunan secara infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. Akan tetapi disatu sisi menjadi tanda awas terhadap sektor pertanian, terlebih terhadap ketersediaan lahan untuk penunjang pangan lokal beras di Provinsi Jawa Barat (Saliem & Ariani, 2016).

Ketersediaan beras di Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Jawa Barat. Kebutuhan masyarakat akan pangan beras tidak bisa ditahan dan sampai saat ini menjadi salah satu sektor yang harus diperhatikan ketersediaannya. Produksi beras di Jawa Barat tahun 2020 adalah sebesar 5.180.201,84 ton. Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 5.262.925,00 ton. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 5.447.806,31. Akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan juga menjadi 5.278.209,00 ton. Dari data diatas dapat dilihat bahwa produksi beras di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2023.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki tanah yang subur. Makanan pokok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah beras, dan ditambah juga ubi kayu dan jenis ubi yang lain serta jagung atau beras jagung. Produksi padi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 adalah sebesar 444.358,24 ton. Pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 445.909,2 ton. Kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 430.961,7 ton. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 391.380,00 ton. Perkembangan jumlah produkai beras di Kabupaten Tasikmalaya tidak lepas dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.865.203 juta jiwa. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.883.733 juta jiwa. Sedangkann pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2022 sebanyak 1.906.288 juta jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 1.960.000 juta jiwa.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan populasi suatu daerah sering kali berkaitan erat dengan konversi lahan, di mana lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan permukiman (Nurpita et al., 2018). Seiring bertambahnya penduduk, kebutuhan akan lahan tempat tinggal meningkat, yang berdampak pada penyusutan lahan pertanian, termasuk lahan sawah sebagai

sumber utama pangan. Peningkatan jumlah penduduk juga mendorong naiknya permintaan terhadap beras. Apabila laju alih fungsi lahan terus berlangsung dengan cepat, maka hal ini dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat (Prasada & Rosa, 2018).

Perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, seperti tingkat perubahan lahan, kondisi topografi, dimensi sosial dan budaya, pertumbuhan penduduk, kesejahteraan petani, infrastruktur irigasi, perluasan kawasan perkotaan, serta komitmen politik dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (Nurmalina, 2016). Meningkatnya konsumsi beras sebagai kebutuhan pokok sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dapat menyebabkan kerentanan pangan, yang seringkali berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Fluktuasi data statistik menunjukkan bahwa pangan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Aridhayandi (2019) menyatakan bahwa harga pangan, pertumbuhan penduduk, serta perubahan penggunaan lahan pertanian ke sektor non-pertanian berdampak negatif, karena kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Krisis pangan di Indonesia dipicu oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya beras, sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah dalam memastikan kecukupan pangan untuk menjaga ketahanan pangan secara menyeluruh (Prabowo, 2010).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada pengendalian dan pengawasan pangan (Prasetyaningtyas & Nindya, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Ndraha (2011) bahwa peran pemerintah merupakan wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang dibutuhkan. Upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan mencakup stabilisasi harga, pengelolaan sistem logistik, transparansi, serta diversifikasi pangan. Menurut Gross (2000) dan Weingartner (2004) dalam Gunawan (2017), ketahanan pangan terdiri atas empat komponen utama, salah satunya adalah ketersediaan pangan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membentuk lembaga resmi yang diberi tugas dan tanggung jawab khusus guna menjamin ketersediaan pangan. Sebagai contoh, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan pangan, demi mewujudkan ketahanan pangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah artikel jurnal dengan judul “STUDI KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAERAH” oleh (Rachim & Zulkifli, 2021) menunjukkan bahwa koordinasi terjadi berpola vertikal dan horizontal. Konteks vertikal tentu koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Sedangkan koordinasi horizontal dalam rangka mendukung koordinasi vertikal. Maksudnya adalah bahwa DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DKP Kabupaten/Kota harus memperoleh dukungan dari stakeholder yang memiliki tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan mengurangi daerah yang memiliki kerawanan pangan. Kedua, jurnal yang disusun oleh (Ginting, 2023) yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN BERAS DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI DI DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON)” bahwa hasil penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah sebagai regulator membentuk peraturan yang menjadi landasan hukum tetap dalam menjaga ketersediaan beras. Ketiga, artikel jurnal dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI DINAS KETAHANAN PANGAN MINAHASA SELATAN)” oleh (Rumawas et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan dalam menciptakan ketahanan pangan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya

pemantauan rutin di pusat-pusat produksi pangan lokal dan daerah pedesaan. Permasalahan ini tercermin dari keluhan para petani dan masyarakat terkait keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk, bibit, dan lahan pertanian. Situasi pangan di Minahasa Selatan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, dimana banyak kebutuhan pangan masyarakat yang belum terpenuhi. Keempat, artikel jurnal dengan judul “BERKOLABORASI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI NUNAVUT” oleh (Wakegijig et al., 2013). Dalam penelitian ini menggambarkan rangkaian aksi yang berkelanjutan, berdasarkan keterlibitan masyarakat dan aksi kolektif, yang telah menghasilkan keterkaitan politik dan mobilisasi publik yang berkelanjutan seputar isu kerawanan pangan di Nunavut. Proses yang dijelaskan dalam artikel ini merupakan kolaborasi unik antara berbagai organisasi yang telah menghasilkan pengembangan kemitraan berkelanjutan yang akan menginformasikan pengembangan kebijakan sekaligus mewakili suara Nunavummiut. Kelima, artikel jurnal dengan judul “MEMBINGKAU KETAHANAN PANGAN DAN STATISTIK KEHILANGAN PANGAN UNTUK PENINGKATAN RANTAI PASOKAN YANG TAJAM DAN TRANSFER PENGETAHUAN ANTARA PRODUSEN MAKANAN KENYA, INDIA, DAN INGGRIS” oleh (Martindale & Wright, 2023). Dalam penelitian ini mengembangkan pengukuran indeks lebih lanjut sehingga dapat diterapkan pada kategori makanan dan digunakan oleh pengolah dan produsen makanan untuk rantai pasok makanan tertentu. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana indeks tersebut dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan operasi rantai pasok dengan mendorong perencanaan pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan yang lebih tajam. Perbaikan gizi difokuskan pada pasokan protein dan pengurangan limbah makanan yang hilang dalam rantai pasokan dan metode-metode ini diuji dengan menggunakan sistem pangan di Kenya, dan India, dimana penelitian ini dilakukan. Penggunaan indeks keberlanjutan dan keamanan yang sudah ada memungkinkan adanya perbandingan yang mendorong transfer pengetahuan dan pembentukan indeks lintas fungsi yang mengukur gizi, keamanan, dan keberlanjutan pangan nasional. Penelitian yang disajikan dalam studi awal ini difokuskan pada penerapan indeks-indeks ini pada rantai pasok pangan tertentu untuk pangan. Keenam, artikel jurnal dengan judul “KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA:PERAN MODAL SOSIAL” oleh (Rusmawati et al., 2023). Studi ini menguji pengaruh modal sosial bonding dan bridging terhadap ketahanan pangan rumah tangga dengan menggunakan regresi 2SLS Lewbel (2012). Pemerintah Indonesia telah secara terus menerus menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, yang bertujuan agar rumah tangga yang rawan pangan dapat secara mandiri memproduksi pangan mereka melalui pembentukan komunitas lokal, seperti kelompok tani. Komunitas-komunitas ini, yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang homogen, menghasilkan modal sosial yang mengikat. Namun, studi ini dan bukti empiris sebelumnya menyoroti efek yang lebih lemah dari ikatan modal sosial terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Studi ini merekomendasikan untuk menggabungkan modal sosial pengikat di antara masyarakat dengan melibatkan peserta yang lebih heterogen, seperti pengusaha, ahli pertanian, dan konsumen potensial, dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi kerawanan pangan. Ketujuh, artikel jurnal dengan judul RESILIENSI PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAERAH DI Indonesia oleh (Budiman & Suhendi, 2024). Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan di wilayah tertentu, yang bertujuan untuk memahami tantangan dan strategi lokal yang menopang akses dan produksi pangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan petani lokal, pemimpin masyarakat, dan pejabat pemerintah. Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus memberikan wawasan tentang persepsi lokal tentang ketahanan pangan, mekanisme adaptasi, dan pengaruh eksternal terhadap produktivitas pertanian. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut sangat terkait dengan stabilitas pertanian, ketersediaan sumber daya air, dan dukungan kelembagaan. Kedelapan, artikel jurnal dengan judul COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARA oleh (Sartika, 2024). Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Collaborative governance dalam perencanaan

pembangunan daerah belum optimal dilihat dari masih lemahnya pelaksanaan dialog tatap muka, rendahnya rasa saling percaya yang terbangun antar pelaku kolaborasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, serta kurangnya saling pengertian dengan dinamika perbedaan kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 2) Collaborative governance dalam perencanaan pembangunan didukung oleh adanya aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan teori untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan tahun 2011, yaitu teori koordinasi yang terdiri dari dua dimensi yaitu, dimensi koordinasi vertikal, dan dimensi koordinasi horizontal. Teori ini dipilih karena cocok untuk menggambarkan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimana dalam penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan teori koordinasi menurut hasibuan. Selain itu Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis milik Miles and Huberman yang sedikit digunakan oleh penelitian sebelumnya. Selain itu lokus penelitian juga berbeda dari para penelitian terdahulu. Selain itu kondisi penelitian yang dilakukan adalah pasca pandemi Covid-19 dimana keadaan proses pemulihan seluruh lini kehidupan pemerintah dan masyarakat dibangun kembali pasca dilanda pandemi tersebut. Sehingga membuat penelitian ini menarik dan memiliki kebaruan ilmu.

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan, dalam hal ini ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan sebagainya, melalui deskripsi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa alami sesuai dengan konteksnya, serta menggunakan berbagai metode naturalistik (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif juga dipandang sebagai bentuk penelitian yang partisipatif, bersifat fleksibel, dan memungkinkan adanya penyesuaian terhadap rencana awal sesuai dengan dinamika yang ditemukan di lapangan (Syahrizal & Jailani, 2023). Pemilihan metode dan pendekatan ini didasari oleh tujuan utama penulis, yaitu untuk menerapkan metode deskriptif dalam meneliti objek tertentu, baik individu, kelompok manusia, situasi, kondisi, maupun pemikiran yang terjadi pada masa kini. Metode ini digunakan untuk menganalisis serta menggambarkan secara sistematis dan akurat fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung beserta keterkaitannya (Nazir, 2013).

Penulis menggunakan teori koordinai menurut Hasibuan 2011, yaitu koordinai vertikal dan koordinasi horizontal. Sedangkan untuk teknik penentuan informan, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sumber data adalah subjek darimana seorang peneliti dapat memperoleh data (Arikunto, 2006). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan untuk Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik triangulasi data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut miles and Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal merupakan penyalarsan kegiatan atau tindakan yang dilakukan antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi. Dalam Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2011), koordinasi vertikal dalam menjaga ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras terdapat kedalam beberapa indikator:

##### A. Rapat Koordinasi Dengan Pimpinan

Rapat koordinasi terkait ketahanan pangan beras di Kabupaten Tasikmalaya merupakan mekanisme strategis yang melibatkan berbagai jajaran pimpinan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk membahas upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan beras. Dalam konteks koordinasi lintas sektor, rapat ini bertujuan menciptakan sinergitas antara berbagai instansi terkait guna mewujudkan ketahanan pangan yang komprehensif (Hilmi et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Daerah, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Pertanian. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan frekuensi sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi tingkat kabupaten: dilaksanakan setiap bulan, dipimpin oleh Bupati Tasikmalaya;
2. Rapat koordinasi tingkat provinsi: dilaksanakan setiap triwulan, dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Rapat koordinasi tingkat nasional: dilaksanakan setiap semester, dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten.

Dalam rapat-rapat tersebut, dibahas berbagai aspek terkait ketahanan pangan, terutama ketersediaan beras, mulai dari perencanaan tanam, prediksi panen, penanganan pascapanen, hingga distribusi beras ke seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Rapat juga menjadi sarana untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi kendala, serta mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan rapat koordinasi terkait ketahanan pangan juga dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kondisi yang riil yang ada di lapangan, karena setiap daerah memiliki permasalahan atau potensinya masing-masing. Dalam pelaksanaan rapat yang membahas terkait ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkhusus Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas apa saja yang menjadi fokus utama permasalahan ketahanan pangan dilingkungan Kabupaten Tasikmalaya dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan rapat rutin tersebut biasanya dilaksanakan satu bulan sekali. Akan tetapi, apabila terjadi suatu masalah yang urgent maka rapat atau koordinasi untuk membahas masalah tersebut bisa dilakukan kapan saja

Hasil dari rapat koordinasi yang dilaksanakan terkait ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya yaitu ketersediaan beras yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sangat beragam, kebanyakan daerah atau kecamatan di Kabupaten tasikmalaya memiliki ketersediaan beras yang cukup, itu disebabkan oleh kondisi geografis daerah tersebut dan sistem pengairan atau irigasi yang memadai, sehingga petani padi dapat mengelola lahan sawahnya dengan baik sesuai dengan arahan dari pemerintah.

Akan tetapi, yang menjadin permasalahan adalah distribusi pangannya, kebanyakan para petani di Kabupaten Tasikmalaya menjual hasil panennya kepada tengkulak atau bandar yang berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakatnya rendah dan

kebanyakan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu membeli beras dengan harga yang ada, sehingga beras yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu berasal dari luar, seperti dari Jawa Tengah, dan daerah lainnya. Namun, beberapa kendala masih ditemui dalam pelaksanaan rapat koordinasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa terkadang terjadi ketidakhadiran pejabat kunci dalam rapat, yang menyebabkan pengambilan keputusan menjadi tertunda. Selain itu, jadwal rapat yang padat seringkali menyebabkan pembahasan tidak mendalam pada isu-isu tertentu, termasuk permasalahan ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras di beberapa kecamatan terpencil.

## **B. Pemahaman Target Kerja**

Pemahaman target kerja merupakan salah satu indikator krusial dalam koordinasi vertikal yang menggambarkan tingkat pemahaman semua pihak terhadap tujuan dan target yang perlu dicapai dalam suatu kegiatan. Dalam konteks ketahanan pangan, pemahaman target kerja sangatlah penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dimana pangan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dikonsumsi hampir setiap hari sebagai makanan pokok.

Target kerja dalam konteks ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya meliputi target dari produksi padi itu sendiri, tingkat ketersediaan beras, dan stabilitas harga beras. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya selaku Sekretaris dari Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya harus memahami dengan jelas target-target yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan juga harus memastikan bahwa seluruh anggota Satuan Tugas Ketahanan Pangan dibawah koordinasinya juga dapat memahami target-target yang telah ditetapkan. Ini penting supaya terjadi sinergitas antara stakeholder untuk menjaga/mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Setiap sektor memiliki peran dan target kerja yang saling melengkapi, seperti peningkatan produksi pangan lokal, distribusi yang efisien, penguatan cadangan pangan, serta edukasi gizi masyarakat. Dengan adanya keselarasan pemahaman terhadap target kerja masing-masing pihak, diharapkan kebijakan dan program yang dijalankan dapat lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinasi yang efektif akan memperkecil tumpang tindih program dan mempercepat pencapaian target. Kabupaten Tasikmalaya dengan potensi pertanian yang besar memerlukan manajemen kolaboratif untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap target kerja bersama menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan terpadu yang mendukung ketahanan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan

a. Capaian Indikator Kerja Utama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	IKU Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indikator Kinerja	Satuan	Taraget 2024	Realisasi 2024	Presentase Capaian IKU
1	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Capaian Bina Kelompok Tani	%	54,88	80,32	146,36
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,05	(1,02)	97,14
3	Meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	1,20	(0,71)	59,16
4	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan perkapita	%	3,10	2,37	76,45
5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ditambah Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	3,00	2,72	90,66

Sumber : LKIP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya 5 target pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan pada realisasinya masih tidak sesuai harapan, kecuali di bidang Meningkatnya penyuluhan pertanian realisasinya bisa melewati target bahkan lebih.

**b. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya**

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	62	78,88	127,23%
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi	6	21	350%
3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	115,598	129,032	111,62%
4	Meningkatnya pertumbuhan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	10,66	1.066%
5	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1,9	172,73%

Sumber: LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya 5 target pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan pada realisasinya masih tidak sesuai harapan, kecuali di bidang Meningkatnya penyuluhan pertanian realisasinya bisa melewati target bahkan lebih.

Selain berkoordinasi dengan stakeholder di lingkup pemerintahan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan sosialisasi target kerja kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan. Target tersebut kemudian dijabarkan menjadi target operasional di tingkat kecamatan dan desa. Meskipun pemahaman target kerja secara umum sudah baik, namun ditemukan adanya perbedaan interpretasi target antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung menetapkan target yang sangat optimis, sementara pemerintah daerah lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, seperti penurunan luas lahan akibat konversi, serangan hama dan penyakit, serta dampak perubahan iklim. Perbedaan pemahaman ini terkadang menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi. Seperti yang

terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dimana target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak cocok untuk diterapkan di lingkungan mereka.

Target atau kebijakan penanaman padi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu IP 400 dimana dalam setahun para petani harus menanam padi 4 kali di sawah mereka. Akan tetapi, para petani tidak mau melaksanakan kebijakan tersebut karena hasil panen padi mereka malah menurun. Dimana yang awalnya menghasilkan 6,5 kwintal padi dari 2 kali penanaman padi, ketika melaksanakan kebijakan dari pemerintah yaitu menanam padi 3 kali malah menurun hasil panen mereka menjadi 5,5 kwintal padi. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kontur yang berbeda beda. Maka dari itu para petani lebih mementingkan hasil yang didapatkan daripada harus ikut kebijakan dari pemerintah tapi hasilnya kurang memuaskan. Maka dari itu pemahaman akan target kerja itu sangat penting supaya seluruh stakeholder dapat memahami apa yang menjadi tugas mereka sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam menjalankan tugas untuk membantu masyarakat atau para petani yang menjadi aktor utama dalam menjaga/mewujudkan ketahanan pangan.

### **C. Alur Koordinasi**

Dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya, koordinasi vertikal memegang peranan penting sebagai penghubung antara kebijakan di tingkat pusat, provinsi, hingga implementasi di tingkat kabupaten. Alur koordinasi ini diawali dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, yang menetapkan arah kebijakan, program prioritas, serta alokasi anggaran untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional. Kebijakan tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, untuk diselaraskan dengan kondisi wilayah dan dijabarkan ke dalam program-program daerah.

Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan perangkat daerah lainnya. Di sinilah proses adaptasi kebijakan pusat dan provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal, ketersediaan sumber daya, serta permasalahan spesifik yang dihadapi di wilayah kabupaten. Dalam tahap ini, peran Bappeda sangat penting dalam merumuskan strategi dan menyelaraskan lintas sektor di tingkat kabupaten.

Koordinasi vertikal tidak hanya bersifat satu arah dari atas ke bawah (top-down), tetapi juga mencakup umpan balik dari bawah ke atas (bottom-up) (Farina, 2024). Pemerintah kabupaten melalui laporan, evaluasi, dan forum koordinasi regional menyampaikan kondisi lapangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga menjadi masukan dalam perumusan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional. Dengan demikian, koordinasi vertikal yang efektif menciptakan sinergi antar level pemerintahan dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam implementasi dilapangan alur koordinasi secara Top Down dimulai dari melihat permasalahan dan potensi yang ada di wilayah kelompok tani, maka kelompok tani bisa mengajukan permohonan bantuan baik berupa benih, pupuk, sarana prasarana, dan lain lain melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) wilayah binaan masing-masing atau ke BPP (Badan Penyuluh Pertanian). Selanjutnya BPP (Badan Penyuluh Pertanian) merekap dan mengajukannya ke Dinas Pertanian, ketahanan Pangan, dan perikanan sesuai dengan permohonan yang ada di proposal dan di proses sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya Dinas Pertanian menyalurkan bantuan kepada kelompok tani sesuai dengan anggaran dan program yang ada saat itu melalui BPP dan disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan tersebut.

Secara Bottom up penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah dimulai dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan berupa pupuk, benih, anggaran, atau sarana

prasarana pertanian kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. Setelah itu kelompok tani mengajukan proposal, kemudian Dinas Pertanian melihat CPCL (calon petani dan calon lapangan) dari beberapa kelompok tani yang mengajukan atau memiliki potensi. Setelah terpilih beberapa kelompok tani untuk menerima bantuan tersebut maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan verifikasi dan meninjau secara langsung apakah benar-benar kelompok tani tersebut berasal dari wilayahnya sendiri atau tidak. Jadi intinya dalam penyaluran bantuan tersebut harus ada verifikasi terlebih dahulu supaya bantuan yang diberikan itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan ini salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar kelompok dan penyuluh, serta keterlambatan pengajuan dokumen. Selain itu, ada juga kendala teknis di lapangan, seperti distribusi bantuan ke daerah terpencil.

## **2. Koordinasi Horizontal**

Koordinasi Horizontal merupakan penyelarasan atau penyesuaian bagi kegiatan-kegiatan, tanggung jawab, dan wewenang yang berada pada tingkatan organisasi yang setara. Dalam konteks ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya, dimensi koordinasi horizontal ini menjadi krusial karena melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan yang memiliki kedudukan setara namun dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam Teori Koordinasi Menurut Hasibuan (2011) koordinasi horizontal dalam menjaga ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras terdapat kedalam beberapa indikator:

### **A. Kerjasama Antar Unit**

Ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya, merupakan isu strategis yang memerlukan koordinasi horizontal antar berbagai unit pemerintahan dan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu sentra produksi beras di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif untuk menjamin pasokan beras tetap terjaga. Kerjasama antar unit dalam sektor ketahanan pangan khususnya terkait ketersediaan beras terwujud melalui kerjasama antara berbagai dinas, lembaga, maupun antar bidang. Dalam hal produksi padi misalnya, bidang ketahanan pangan, bekerjasama dengan bidang prasarana dan sarana pertanian dalam pengelolaan infrastruktur irigasi. Jaringan irigasi yang baik menjadi tulang punggung produksi padi, sehingga kedua bidang ini perlu menyelaraskan program kerja mereka. Pengaturan jadwal irigasi dan pemeliharaan saluran air dilakukan bersama untuk memastikan ketersediaan air di musim tanam maupun musim kemarau. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi teknis dalam aspek produksi pangan.

Bulog Tasikmalaya bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dalam hal penyerapan gabah hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kerjasama ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran. Dalam pengolahan pasca panen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Bulog untuk mengelola stok dan distribusi beras. Pemantauan harga dan pasokan di pasar menjadi tanggung jawab bersama, dengan data yang dipertukarkan secara berkala. Sistem informasi pasar yang terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat ketika terjadi fluktuasi harga atau kelangkaan di tingkat konsumen.

Perum Bulog sebagai lembaga penyangga beras nasional menjalin koordinasi erat dengan pemerintah daerah dalam pengadaan dan penyaluran beras. Penetapan gudang penyimpanan dan titik-titik distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari kecamatan dan desa. Forum

koordinasi yang melibatkan camat, kepala desa, dan Bulog memungkinkan respon cepat terhadap potensi kelangkaan di wilayah tertentu.

**Tabel 3.3**  
**Rekap CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) Kabupaten**  
**Tasikmalaya Periode 2021-2024**

TAHUN	KUANTUM (Kg)
2021	83,950.69
2022	100,044.99
2023	53,532.91
2024	57,013.52

Sumber : Bulog Tasikmalaya, 2024

Dalam menstabilkan harga di pasaran, maka dilaksanakan Operasi pasar. Operasi pasar di Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag), guna menstabilkan harga kebutuhan pokok di tengah fluktuasi pasar, terutama saat menjelang hari besar keagamaan, musim paceklik, atau ketika terjadi lonjakan harga bahan pokok. Mekanisme pelaksanaannya diawali dengan pemantauan harga-harga kebutuhan pokok di berbagai pasar tradisional yang tersebar di wilayah kabupaten. Tim dari dinas terkait akan mengidentifikasi komoditas yang mengalami lonjakan harga signifikan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan daging ayam. Setelah dilakukan identifikasi dan evaluasi, pemerintah daerah kemudian berkoordinasi dengan Bulog dan distributor besar untuk menyiapkan stok barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi atau lebih murah dari harga pasar. Barang-barang ini selanjutnya didistribusikan ke titik-titik tertentu, seperti alun-alun, kantor kecamatan, atau lokasi strategis lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.

Operasi pasar dilaksanakan dalam bentuk bazar atau pasar murah, di mana masyarakat bisa langsung membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Setiap pembelian biasanya dibatasi jumlahnya agar bisa merata dan tidak dimonopoli oleh satu pihak. Pelaksanaan operasi pasar ini juga melibatkan petugas pengawas yang memastikan tidak ada penimbunan, praktik curang, atau penyalahgunaan distribusi. Melalui operasi pasar ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi di daerah bisa dikendalikan. Selain itu, kehadiran operasi pasar juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen dari gejolak harga yang merugikan.

Tantangan dalam koordinasi horizontal antara lain ego sektoral, overlapping kewenangan, dan perbedaan prioritas antar unit. Untuk mengatasinya, pemerintah kabupaten perlu memperkuat kerangka regulasi yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan secara jelas, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses semua pihak. Keberhasilan koordinasi horizontal antar unit di Kabupaten Tasikmalaya akan menjamin ketahanan pangan berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan beras sebagai makanan pokok masyarakat.

### **B. Penyelarasan Visi dan Misi**

Dalam upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya, penyelarasan visi dan misi antar perangkat daerah dan instansi lintas sektor menjadi langkah strategis yang krusial. Koordinasi horizontal, yang melibatkan berbagai dinas dan lembaga di tingkat daerah

seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, serta Bappeda, diarahkan pada terciptanya sinergi program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sektor memiliki pemahaman yang sama terhadap visi besar pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian dan keberlanjutan pangan. Melalui forum-forum koordinasi lintas sektor, perencanaan program tidak lagi dilakukan secara sektoral dan terpisah, melainkan berbasis integrasi yang mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengendalian kerawanan pangan.

Keberhasilan koordinasi horizontal juga ditentukan oleh adanya platform komunikasi yang efektif. Forum Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah dapat menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan sinkronisasi program, berbagi informasi, dan menyelesaikan permasalahan secara bersama. Pertemuan berkala antar sektor dengan melibatkan kelompok tani dan pihak swasta akan menciptakan pemahaman bersama terhadap prioritas dan strategi yang akan ditempuh.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu menyatukan strategi dalam hal penguatan produksi lokal, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta penyaluran bantuan pertanian yang tepat sasaran (Sukari, Bambang H.Suta Purwana, 2016). Di sisi lain, Dinas Sosial dapat memberikan dukungan melalui program pengentasan kemiskinan berbasis pangan, sementara Bappeda memegang peran sebagai fasilitator dalam mengintegrasikan perencanaan lintas sektor melalui dokumen RPJMD dan RKPd. Penyelarasan visi dan misi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menciptakan komitmen kolektif dalam menjawab tantangan-tantangan ketahanan pangan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta distribusi pangan yang belum merata. Dengan membangun koordinasi horizontal yang kuat, Kabupaten Tasikmalaya mampu membentuk sistem ketahanan pangan yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan bergizi bagi seluruh masyarakat. Pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas diantara berbagai sektor merupakan hal fundamental dan sangat penting.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang melibatkan Bupati, DPRD, dan kepala instansi terkait telah menyepakati bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal ini menjadi landasan strategis bagi penyelarasan visi dan misi antar instansi. Keberhasilan penyelarasan visi dan misi dalam dimensi koordinasi horizontal akan terlihat dari indikator-indikator seperti meningkatnya produksi padi, stabilnya harga beras, terjaminnya stok pangan, dan meningkatnya kesejahteraan petani di Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini akan mampu menjawab kompleksitas tantangan ketahanan pangan di era modern, di mana faktor-faktor global seperti perubahan iklim dan dinamika pasar internasional turut mempengaruhi kondisi lokal

### **C. Konsultasi Dengan Bagian Lain**

Konsultasi dengan bagian lain merupakan indikator penting dalam koordinasi horizontal yang menunjukkan adanya komunikasi aktif antar instansi (Mursalin et al., 2024). Dalam internal Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Bidang Ketahanan Pangan secara rutin melakukan konsultasi dengan Bidang Tanaman pangan terkait proyeksi produksi padi untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan beras. Bulog Tasikmalaya melakukan konsultasi dengan Dinas Perdagangan terkait distribusi beras dan pemantauan harga di pasar. Konsultasi ini penting untuk memastikan ketersediaan beras di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan harga yang terjangkau. Meskipun demikian, intensitas konsultasi antar instansi masih belum optimal. Berdasarkan observasi, konsultasi lebih sering dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Dalam memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat, maka peran dari penyuluh pertanian sangat penting untuk memberikan pendampingan kepada para petani supaya petani dapat memproduksi padi dengan cara yang benar dan hasilnya pun dapat maksimal. Penyuluh pertanian di Kabupaten Tasikmalaya berperan sebagai garda terdepan dalam mentransfer teknologi pertanian dari pusat penelitian ke petani. Mereka tidak hanya memberikan informasi tentang varietas unggul dan teknik budidaya modern, tetapi juga membantu petani dalam implementasi praktis di lapangan. Melalui pendekatan partisipatif, penyuluh mengajarkan petani cara meningkatkan produktivitas padi, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit, pemupukan berimbang, hingga pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.

Pendampingan yang dilakukan tidak berhenti pada aspek teknis budidaya. Penyuluh Pertanian turut berperan secara aktif dalam membentuk dan mengelola kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Melalui wadah kelembagaan ini, penyuluh membantu petani memperoleh akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, dan inovasi teknologi pertanian. Penguatan kelembagaan petani ini menjadi kunci keberhasilan program intensifikasi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam konteks ketahanan pangan, penyuluh pertanian di Tasikmalaya juga aktif mendorong diversifikasi usahatani untuk meminimalisir risiko kegagalan panen. Mereka mendampingi petani dalam mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan padi dengan komoditas lain seperti ikan, ternak, atau tanaman hortikultura. Pendekatan ini tidak hanya menjamin ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan melalui penyuluh pertanian, para petani merasa terbantu dengan keterbatasan ilmu yang petani miliki.

Keberhasilan pendampingan penyuluh pertanian di Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari peningkatan produktivitas padi dan stabilnya ketersediaan beras di daerah tersebut. Namun, upaya ini perlu terus ditingkatkan mengingat tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas penyuluh menjadi prasyarat utama agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengangkat isu sentral terkait kurangnya efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya pada aspek ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam konteks ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan, penelitian ini menyoroti bahwa koordinasi yang optimal antar sektor menjadi kunci keberhasilan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori koordinasi dari Hasibuan yang membagi koordinasi menjadi dua dimensi: vertikal dan horizontal. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan maksimal. Dalam dimensi vertikal, masih terdapat kesenjangan interpretasi antara target pusat dan daerah serta ketidakhadiran pejabat kunci dalam rapat koordinasi, yang menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat. Sementara pada dimensi horizontal, permasalahan utama terletak pada lemahnya pencatatan data serta distribusi beras yang tidak merata dan tidak terintegrasi antar instansi yang setara. Dalam dimensi horizontal ini pemerintah melalui Dinas Perindustrian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berkolaborasi dengan *stakeholder* lain untuk melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung ketersediaan beras, membantu masyarakat supaya bisa membeli harga pangan di pasaran dengan harga terjangkau, dan menstabilkan harga pangan dipasaran.

Koordinasi yang belum sinkron ini berdampak langsung terhadap ketersediaan beras yang menjadi komoditas pangan utama di wilayah tersebut. Tingginya pertumbuhan penduduk dan alih

fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman turut memperparah situasi ketersediaan pangan. Selain itu, keterbatasan logistik dan kurangnya data akurat memperbesar risiko terjadinya rawan pangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar instansi melalui penyeragaman target antara pusat dan daerah serta penegasan kehadiran pejabat strategis dalam forum koordinasi. Hasil ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan publik di sektor pangan dan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola koordinasi yang lebih efektif dan terarah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Koordinasi Lintas Sektor Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tasikmalaya, yang dianalisis dengan konsep koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga ketahanan pangan khususnya pangan beras telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, baik secara koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras di Kabupaten Tasikmalaya, bahwa koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Koordinasi vertikal antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah telah berjalan cukup baik melalui mekanisme rapat rutin, pemahaman target kerja, dan alur koordinasi yang terstruktur. Pemahaman target kerja di antara stakeholder terkait ketahanan pangan cukup baik. Masing-masing instansi memahami tugas dan fungsinya dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Alur koordinasi vertikal telah terbangun dengan baik, menghubungkan berbagai tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Kebijakan strategis dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dioperasionalkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat melalui program-program di tingkat Kabupaten/Kota.

Namun demikian ditemukan adanya perbedaan interpretasi target antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung menetapkan target yang sangat tinggi, sementara pemerintah daerah lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, selain itu masih terdapat beberapa kendala seperti ketidakhadiran pejabat kunci dalam rapat, perbedaan interpretasi target kerja antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pencatatan data distribusi beras. Faktor geografis dan sistem irigasi yang memadai menjadi keunggulan Kabupaten Tasikmalaya dalam produksi padi. Namun, distribusi hasil panen sering kali terkendala karena sebagian besar beras dijual ke luar daerah, sementara daya beli masyarakat lokal terhadap beras berkualitas tinggi masih rendah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya, dan bagaimana supaya daya beli masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya tinggi.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran pemerintah kabupaten Tasikmalaya, para kepala OPD yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Dosen Pembimbing, Orang Tua dan Keluarga, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Imran, S., & Rauf, A. (2022). *Analisis Ketersediaan Beras Di Kabupaten Gorontalo Selang Tahun 2021-2030*. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 6(3), 187–197. <https://doi.org/10.37046/agr.v6i3.16138>.
- Sulaiman, A. I. (2017). *PENGEMBANGAN AGROWISATA BERBASIS KETAHANAN PANGAN MELALUI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DI DESA SERANG PURBALINGGA AGRITOURISM*. 9, 9–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v9i1.423>.
- Agustian, A. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT*. 1, 464–469. <https://jurnal.unigal.ac.id/prosiding/article/view/7815>.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farina, I. (2024). *Manajemen Dalam Komunikasi“Perspektif Teori Manajemen Henry Fayol”*. *JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 3, 10–17. <http://jurnal.utu.ac.id/JIMSI>.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya*. 3(2), 91–102. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/view/1111>.
- Mursalin, M., Natsir, N., Jl, A., No, S., & Selatan, S. (2024). *Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Tallo di Makassar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar , Indonesia*. 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4067>.
- Nurmalina, R. (2016). *Analisis Indeks dan Status Keberlanjutan Sistem Ketersediaan Beras di Beberapa Wilayah Indonesia*. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(1), 47. <https://doi.org/10.21082/jae.v26n1.2008.47-79>.
- Nurpita, A., Wihastuti, L., & Andjani, I. Y. (2018). *Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progro*. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 103. <https://doi.org/10.22146/jgs.34055>.
- Prasetyaningtyas, D., & Nindya, T. S. (2018). *Hubungan Antara Ketersediaan Pangan Dengan Keragaman Pangan Rumah Tangga Buruh Tani*. *Media Gizi Indonesia*, 12(2), 149. <https://doi.org/10.20473/mgi.v12i2.149-155>.
- Rachim, A., & Zulkifli. (2021). *Studi Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Daerah*. *JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management)*, 2, 38–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.54144/jpbm.v2i1.18>.
- Rumawas, V. V, Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)*. *Governance*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/33652/31841>.

- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). *Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>.
- Sukari, Bambang H.Suta Purwana, M. (2016). *Kearifan Lokal dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani di Desa Lencoh, Selo, Boyolali, Jawa Tengah* (Sukari, Bambang H. Suta Purwana, Mudjijono) (Z-Library).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Ginting, A.H. (2023). *PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN BERAS DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI DI DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON)*. 1, 13–14. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16496>.
- Budiman, L., & Suhendi, D. (2024). *Resiliensi penguatan ketahanan pangan daerah di indonesia*. 01(2), 63–71. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/5113>.
- Sartika, I. (2024). *Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat*. 14(2), 209–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2>.
- Martindale, W., & Wright. (2023). *Framing food security and food loss statistics for sharp supply chain improvements and knowledge transfer between Kenyan, Indian and UK food producers*. 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13414.1>.
- Rusmawati, E., Hartono, D., & Aritenang, A. F. (2023). Food security in Indonesia: the role of social capital. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2169732>.
- Wakegijig, J., Osborne, G., Statham, S., & Issaluk, M. D. (2013). Collaborating toward improving food security in Nunavut. *International Journal of Circumpolar Health*, 72(SUPPL.1). <https://doi.org/10.3402/ijch.v72i0.21201>.